

# Dimensi Keseharian dan Implikasinya Pada Tata Ruang Permukiman Tepi Sungai: Sebuah Telaah Taktik dan Strategi

Mira S. Lubis<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

E-mail korespondensi: [miralubis@gmail.com](mailto:miralubis@gmail.com)

**Abstrak:** Permukiman bantaran sungai sering dicap sebagai permukiman kumuh. Ini juga terjadi di kota-kota Kalimantan, yang secara historis berakar kuat pada budaya sungai. Kajian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari penduduk permukiman tepi sungai di Kalimantan, di tengah pesatnya perkembangan kota dan perubahan lingkungan, yang mencerminkan upaya mereka dalam mempertahankan eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Permukiman terapung atau lanting di Kota Sintang dipilih sebagai studi kasus. Pendekatan etnografi spasial yang didukung dengan observasi dan wawancara mendalam digunakan untuk mengungkap keseharian warga dan implikasinya pada ruang kota. Dengan pendekatan taktik-strategi (Perramond, 2007), penelitian ini mengungkapkan makna penting di balik aktivitas sehari-hari penduduk lanting yang mencerminkan pengaruh signifikan dari pikiran dan tindakan masyarakat dalam produksi dan reproduksi ruang hidup mereka.

Kata kunci: keseharian, ekologi politik, permukiman tepi sungai, taktik dan strategi

**Abstract:** *Riverbank settlements are often labeled as slums. It also happened in the cities of Borneo, which historically are deeply rooted in riverine culture. This study describes the daily life of community of riverbank settlements in Kalimantan, in the midst of rapid urban development and environmental changes, which reflects their efforts in defending their existence as part of urban society. The floating houses or 'lanting' settlement in Sintang City was selected as a case study. A spatial ethnographic approach supported by in-depth observations and interviews is used to reveal the daily lives of residents and their implications for urban. Converting the events into tactic-strategy approach (Perramond, 2007), this study reveals the important meanings behind the daily activities of the lanting inhabitants which reflects the significant influence of people's thoughts and actions in the production and reproduction of their living space.*

*Keywords: everyday life, political ecology, riverine settlement, tactics and strategies*

**How to cite (APA 6th Style):**

Lubis, Mira S. (2022). Dimensi Keseharian dan Implikasinya Pada Tata Ruang Permukiman Tepi Sungai: Sebuah Telaah Taktik dan Strategi, 3 (1), 22-32. doi: 10.26418/uniplan.v3i1.55477

## 1. PENDAHULUAN

Secara historis, manusia telah mengikuti jaringan sungai selama migrasi pada fase awal pemukiman (Bertuzzo et al., 2007) dan lebih memilih membangun pemukiman dekat dengan sungai, untuk tujuan navigasi, suplai air, dan perdagangan (Kummu et al, 2011). Hampir seluruh pusat-pusat peradaban awal manusia merupakan 'hydraulic empire' (Wittfogel, 1957) yang mempertahankan kekuasaan melalui kontrol yang bersifat eksklusif atas air. Seiring waktu, permukiman yang mapan ini secara bertahap berkembang menjadi kota-kota besar bahkan megapolitan, akibat pesatnya urbanisasi (Grimm et al., 2008).

Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia, yang memiliki ratusan, bahkan ribuan, sungai dan anak sungai, di mana Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, dengan panjang 1.143 kilometer, merupakan sungai terpanjang di seluruh pulau (Khee et al, 2015). Selama berabad-abad, permukiman tradisional di tepi sungai, baik rumah panggung maupun rumah terapung telah dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat Kalimantan (Evers, 2015). Permukiman-permukiman tradisional tepi sungai tersebut berkembang biak

secara acak di sungai-sungai besar Kalimantan, seperti Kapuas, Kahayan, Barito, dan Mahakam, terintegrasi dengan jaringan sungai dan anak sungai yang hampir seluruhnya dapat dilayari.

Dewasa ini, kondisi ekologi sungai yang dulunya merupakan basis vital bagi permukiman tepi sungai, semakin tidak stabil. Saat ini, masyarakat pemukim tepi sungai harus hidup di tengah kondisi sungai yang menurun, antara lain akibat pencemaran (karena adanya kegiatan perkebunan besar-besaran, penambangan emas ilegal, dan penggunaan racun untuk kegiatan penangkapan ikan), arus sungai dan pasang surut yang ekstrem (akibat penggundulan hutan di hulu sungai), serta kesadaran akan pengelolaan lingkungan yang kurang baik di masyarakat, dengan membuang sampah ke sungai.

Dalam beberapa kasus permukiman sungai perkotaan di kota-kota Kalimantan, seperti di Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda, permukiman-permukiman ini sering dilabeli sebagai kawasan kumuh dan liar, seperti layaknya kampung-kampung bantaran sungai di Jakarta atau Surabaya, yang warganya digusur paksa dan direlokasi ke tempat lain, untuk alasan mitigasi banjir atau hanya untuk memenuhi imajinasi 'green waterfront global city' (King & Idawati 2010, Hellman 2018). Karakter kota berbudaya sungai yang telah mengakar kuat selama puluhan tahun perlahan menghilang dari wajah kota-kota Kalimantan, meski kampung-kampung terapung masih bertahan hingga saat ini. Upaya-upaya pelestarian kawasan waterfront yang menjadi bagian dari kota tua, umumnya lebih sering terfokus pada bangunan cagar budaya saja, sementara cara hidup, tradisi, dan struktur sosial ekonomi masyarakat tidak dilestarikan (Prompayuk & Chairattananon, 2016).

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap dimensi keseharian masyarakat permukiman tepi sungai di Kalimantan yang berimplikasi pada praktik tata ruang perkotaan, dengan menggunakan pendekatan 'taktik dan strategi'. Dalam perspektif ekologi politik, yang melihat hubungan timbal balik antara proses-proses sosial, politik dan ekonomi dengan proses-proses perubahan lingkungan (Blaikie & Brookfield, 1987; Swyngedouw et al, 2002), taktik dan strategi dapat mendukung pentingnya dimensi skalar penelitian, di mana pengamatan jangka pendek memainkan peranan penting dalam membangun pengetahuan tentang suatu fenomena relasi alam dan masyarakat dalam bentuk ekologi politik keseharian, yang sama pentingnya dengan penelitian mengenai ekologi politik global maupun kesejarahan. Pendekatan taktik dan strategi ini diharapkan dapat menjembatani studi-studi empirik dengan studi-studi yang menggunakan analisis berbasis wacana yang didorong secara teoretis.

## 2. KONSEP TAKTIK DAN STRATEGI

Taktik dan strategi adalah suatu pendekatan dalam studi ekologi politik yang bekerja dengan kejadian sinkronis dan fenomena sehari-hari (Perramond, 2007). Pengamatan terhadap tindakan-tindakan sehari-hari dalam bentuk taktik dan strategi dianggap lebih efektif daripada kegiatan-kegiatan biasa yang disaksikan oleh pengamat. Dampak dari keputusan taktis dan strategis dapat terlihat secara dramatis di lapangan dan lebih mencerminkan pengaruh nyata dari niat manusia dalam membentuk atau menghambat perubahan. Dengan menangkap maksud individu dan institusi yang lebih besar, bagian ini menggarisbawahi peran kuat agen politik, bukan hanya institusi, yang bermain dalam otorisasi lingkungan (Robbins 1998), dan dapat memberikan titik awal untuk penelitian manusia-lingkungan dimana konteksnya mungkin tidak terkait secara efektif dalam frame jangka panjang. Pendekatan ini juga menghasilkan pengertian yang lebih spesifik tentang agensi politik dan/atau agensi ekologis, ketika maksud dapat didokumentasikan sebagai rangkaian taktik atau strategi yang mengarah pada beberapa tujuan. Jika studi hubungan manusia-ekologi awalnya dianggap terlalu fokus pada lokasi spesifik, studi ekologi politik dewasa ini seringkali tampak begitu struktural sehingga 'ekonomi politik' atau 'kapitalisme' terlihat sebagai 'superorganic' post-struktural yang tidak ter jelaskan dengan baik. Untuk mengantisipasinya, pendekatan taktik dan strategi dalam ekologi politik fokus pada pengamatan kejadian-kejadian dan tindakan-tindakan di lapangan dengan mengakomodasi agensi politik, pengaruh dan jaringan yang lebih besar, dan penggerak maupun perubahan-perubahan ekologis dengan cara yang lebih kongkrit dan eksplisit.

Dalam pendekatan ini, Perramond berpegang pada de Certeau dan Rendall (1984), yang dalam bukunya 'The Practice of Everyday Life' menyentuh berbagai aspek pengalaman hidup sehari-hari. Meskipun ia

menulis lebih spesifik tentang masyarakat konsumen modern, ia menggunakan dua konsep 'taktik' dan 'strategi' dengan istilah yang sangat spesifik. De Certeau dan Rendall berpendapat bahwa taktik merupakan praktik-praktik kecil keseharian, dalam waktu singkat, tanpa kontrol atas konteks atau ruang di mana praktik tersebut terjadi. Sedangkan 'strategi' sifatnya lebih sistematis, karena ada kontrol yang lebih luas dan terfokus terhadap ruang di mana kegiatan tersebut berlangsung. Waktu tidak lagi menjadi penting, karena di sini 'ruang' menjadi lebih penting. Ruang merupakan tempat taktik-taktik terakumulasi menjadi strategi yang lebih besar. Strategi dikaitkan dengan institusi dan struktur kekuasaan yang merupakan "produsen", sementara individu adalah "konsumen" yang bertindak sesuai dengan, atau melawan, lingkungan yang ditentukan oleh strategi dengan menggunakan "taktik". Certeau dan Rendall menegaskan bahwa "kota" adalah hasil strategi pemerintah, perusahaan, dan badan kelembagaan lainnya yang menghasilkan produk-produk seperti master plan dan peta-peta yang menggambarkan kota sebagai satu kesatuan yang utuh (Ibid., 1984).

Selain De Certeau dan Rendall, Henri Lefebvre (1991) juga menekankan bahwa dalam produksi jenis tempat (place) dan ruang (space) tertentu, taktik dan strategi merupakan bentuk-bentuk kunci dari fisikalitas. Dengan kata lain, suatu peristiwa yang diamati di lapangan mungkin merupakan tindakan tunggal yang terjadi secara langsung. Jika peristiwa tersebut terjadi lebih dari sekali, atau merupakan taktik berulang, maka ini mungkin menjelaskan suatu konteks kebiasaan atau perilaku. Jadi, meskipun 'taktik' adalah kejadian tunggal, namun yang penting adalah bagaimana akumulasi taktik dalam keseharian menjadi sesuatu yang lebih nyata (tangible) dan bisa dijelaskan (Lefebvre, 1947). Lefebvre juga mendefinisikan kehidupan sehari-hari (everyday life) secara dialektik sebagai "the intersection of illusion and truth, power and helplessness; the intersection of the sector man controls and the sector he does not control." (Lefebvre, 1947:40).

Selain De Certeau dan Lefebvre, Chase, Crawford dan Kaliski (1999) juga memperkenalkan konsep 'everyday urbanism', yang diartikan sebagai "an approach to urbanism that finds its meanings in everyday life". Bertolak belakang dengan New Urbanism yang lebih mementingkan estetika, everyday urbanism sangat peduli pada kegiatan-kegiatan manusia urban yang sangat spesifik dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pertimbangan dalam keputusan perencanaan dan perancangan kota. Ini merupakan pendekatan empiris yang memandang penting situasi maupun pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang cenderung luput dari perhatian para perencana kota umumnya. Berbeda dengan cara pandang praktik desain perkotaan, everyday urbanism tidak tertarik pada rekayasa sempurna suatu kawasan atau ruang kota (taman, plaza, waterfront promenade, dan sebagainya), melainkan fokus pada pengalaman yang intens bagi arsitek atau urban planner dalam bekerja bersama masyarakat dalam memahami ruang sehari-hari, agar dapat menghubungkan kembali makna manusia dan makna sosial dengan perancangan Arsitektur maupun perencanaan perkotaan (Chase, Crawford dan Kaliski, 1999).

### 3. DATA DAN METODE

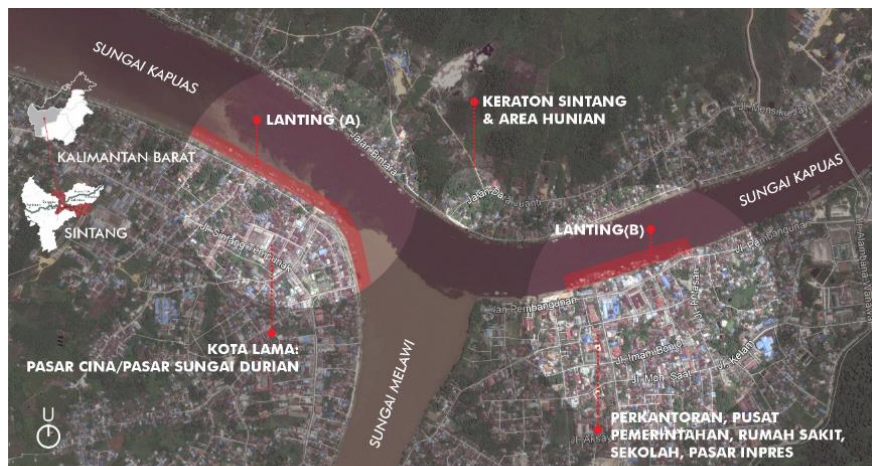
Kajian ini berupaya memperoleh gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat permukiman tepi sungai di Kalimantan, di tengah pesatnya perkembangan kota dan perubahan lingkungan sungai, yang mencerminkan upaya mereka dalam mempertahankan eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat urban. Permukiman terapung atau lanting di Kota Sintang dipilih sebagai studi kasus penelitian ini. Sintang merupakan ibu kota kabupaten yang terletak di pedalaman Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk 68.126 jiwa (2015), yang berkembang cukup pesat dan semakin mencirikan masyarakat perkotaan. Saat studi ini dilakukan (2018-2019) terdapat sekitar 130 rumah lanting, sebagian besar di antaranya berfungsi sebagai jamban dan tempat mencuci, sedangkan sisanya adalah rumah tinggal (10 buah), losmen (15 buah), dan tempat usaha lainnya (12 buah).

Pendekatan etnografi spasial (yang merupakan bagian dari kajian etnografi yang berupaya mengungkap kehidupan sehari-hari yang terjadi di dalam konteks spasial), yang didukung dengan observasi dan wawancara mendalam digunakan untuk mengungkap ekologi politik sehari-hari penduduk lanting (Little, 2007; Tedlock, 2000). Partisipan dalam penelitian ini sebagian besar adalah penghuni lanting, yang berlokasi di dua wilayah utama: Sungai Durian (Sintang Barat) dan Pasar Inpres (Sintang Timur). Penentuan

partisipan mengikuti teknik *snowball* dan *purposive sampling*. Data-data diolah dengan pengodean dan pengkategorian, serta dianalisis secara kualitatif.



Gambar 1. Kota Sintang, Kalimantan Barat



LANTING (A)

- Lanting
- Kawasan Kota Lama (Pasar Cina/Sungai Durian)
- Dermaga/Kopol
- Parkir sampan



LANTING (B)

- Lanting
- Perkantoran, Pusat Pemerintahan, Rumah Sakit, Sekolah, Pasar Inpres

Gambar 2. Permukiman terapung tepi sungai di Kawasan Pasar Sungai Durian dan Pasar Tanjung Puri, Kota Sintang

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, pembahasan permukiman tepi sungai dalam dimensi kontemporer (masa kini) difokuskan pada aspek kehidupan sehari-hari, yang didasarkan pada hasil pengodean dan pengkategorian data, dan merupakan narasi-narasi dominan yang muncul dari pengodean terbuka. Berikut ini akan dijelaskan isu-isu atau konsep sentral dalam keseharian pemukim lanting di Kota Sintang, dengan menggunakan perspektif taktik dan strategi. Praktik-praktik keseharian masyarakat pemukim lanting di Sintang secara umum dapat dikelompokkan menjadi kegiatan transit, kegiatan dalam konteks jejaring wilayah, kegiatan pada ruang urban, kegiatan politik sehari-hari, serta respon-respon terhadap perubahan lingkungan.

#### 1. Lanting sebagai 'ruang transit'

Konsep transit pada lanting tidak sekedar bermakna menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya, namun lebih dari itu. Fungsi tempat kost misalnya, memiliki arti 'transit' atau tinggal untuk sementara waktu, sebelum menemukan tempat tinggal baru yang lebih mapan, sehingga 'transit' bisa bermakna dari fase kehidupan sebelumnya ke fase kehidupan selanjutnya yang lebih baik/menjanjikan. Fungsi transit tidak lepas dari adanya perbedaan karakteristik dari tempat asal dan tempat tujuan, yang memunculkan konsekuensi warga lanting untuk bermobilisasi. Konsep transit ini erat kaitannya dengan konsep berikutnya, yaitu 'jejaring'.

#### 2. Lanting dalam konstelasi 'jejaring'

Konsep jejaring ini pada dasarnya lebih kompleks dari cara pandang konvensional terhadap kota-desa atau hulu-hilir yang terkesan biner dan dikotomis. Istilah hulu-hilir, misalnya. Aliran sungai Kapuas, Melawi beserta cabang-cabang sungainya memiliki sistem hulu-hilir yang kompleks seperti serabut dendritik. Bagian hilir sebuah anak sungai bisa berarti bagian hulu untuk sungai besarnya. Begitu pula istilah kota-desa. Narasi-narasi partisipan seputar kota dan desa adalah keterhubungan yang kompleks antara Sintang dengan kota-kota kecamatan, Sintang dengan desa/kampung terpencil, Sintang dengan danau penghasil ikan, Sintang dengan hutan penghasil karet, Sintang dengan basis-basis produksi perkebunan dan tambang, maupun antara Sintang dengan Kota Pontianak (ibu kota provinsi) di ujung muara sungai. Dan keseharian warga lanting berada dalam konstelasi jejaring yang kompleks ini, dalam berbagai manifestasi bentuk kegiatan yang sangat beragam.

Berbagai fungsi komersial pada lanting mencerminkan interaksi ekonomi dan sosial antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, berbasis jaringan dendritik sungai, yang digambarkan oleh Kenneth Lynch (2005) sebagai aliran pertukaran manusia, makanan, uang, lingkungan, serta pertukaran informasi dan gagasan-gagasan baru. Pola-pola mobilitas masyarakat lanting ini cenderung mematahkan konsep biner kota-desa, yang terlalu menyederhanakan pola-pola interaksi yang sesungguhnya lebih kompleks, dimana konsep biner kota-desa cenderung menyulitkan pengambil keputusan dan ahli sosial untuk mempertahankan pemahaman struktural dari dikotomi ini (Ryoji, 2017).

#### 3. Lanting dan Ruang Kegiatan 'Urban'

Narasi-narasi dalam data mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat lanting (bekerja di kota, berobat ke RS, belanja grosir, urusan ke bank/kantor pemerintahan, berdagang, melanjutkan studi) merupakan kegiatan-kegiatan yang bercirikan 'urban'. Pemanfaatan lanting sebagai ruang produksi dan komersial telah memberikan nilai tambah bagi permukiman ini. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya taktis untuk mengangkat peran lanting, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat lanting untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi perkotaan (Dhananka 2016). Hal ini juga sebagai bentuk kontrol dan kekuatan masyarakat lanting dalam mempertahankan eksistensinya, sekaligus sebagai upaya menghilangkan citra negatif terhadap permukiman lanting (Fox, 2013).

#### 4. Lanting dan Politik Sehari-hari

Sejumlah narasi yang saling terkait satu sama lainnya memberikan gambaran mengenai praktik-praktik politik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lanting serta konteks keruangannya. Misalnya, praktik memperebutkan tempat/lokasi yang paling strategis, dilakukan dengan konsensus tak tertulis antar warga lanting, "siapa cepat dia dapat". Selain memperebutkan tempat, mempertahankan tempat juga merupakan politik keseharian yang sarat akan persaingan dan berpeluang memunculkan konflik antar warga, karena tidak seperti layaknya rumah tapak, posisi lanting selalu bergerak, tidak statis. Arus sungai dan angin dengan mudah menyebabkan lanting bergeser, meskipun ditambatkan di bantaran sungai. Dalam hal ini, praktik hunian pada dasarnya adalah praktik quotidian yang terus menerus menandai dan mengklaim ruang

(Rose, 2012). Klaim masyarakat Lanting terhadap ruang kota (yang tidak diatur dalam penataan ruang formal), dengan menggunakan istilah Lefebvre, merupakan perwujudan dari 'ruang diferensial', di mana kekuatan pasar dan negara yang mengatur produksi spasial dapat diimbangi (Lefebvre, 1991).

Selanjutnya, adanya stigma masyarakat lanting sebagai "orang bawah" dan warga Sintang daratan sebagai "orang atas" (yang merupakan kode In-Vivo) merupakan bentuk relasi kuasa yang tidak sejajar antara warga lanting dengan warga di darat, di mana warga lanting di sini adalah pihak yang termarginalkan. Posisi marginal ini kemudian mengharuskan warga lanting untuk senantiasa 'menjaga hubungan baik dengan ketua RT/aparat'. Relasi kuasa yang tidak sejajar pada akhirnya memunculkan isu ketidakadilan ruang. Keadilan spasial (spatial justice) mengacu pada akses umum ke barang publik, layanan dasar, barang budaya, peluang ekonomi dan lingkungan yang sehat melalui perencanaan tata ruang yang adil, inklusif dan efisien, desain dan pengelolaan ruang dan sumber daya perkotaan dan pedesaan (Rocco, 2014). Beberapa isu ketidakadilan spasial pada permukiman lanting Sintang di antaranya adalah:

- Belum adanya kepastian hukum tentang apakah tinggal di lanting diperbolehkan atau tidak. Masyarakat lanting selalu merasa was-was terhadap kemungkinan digusur.
- Masyarakat lanting tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dasar perkotaan. Terutama setelah air sungai tidak layak dikonsumsi, mereka bahkan harus membeli air ke darat di musim kemarau.
- Pada saat musim kemarau di mana air sungai surut bahkan kering, warga lanting mengalami kesulitan akses untuk 'naik' ke darat. Ini mengganggu kelancaran aktivitas sehari-hari seperti bersekolah, pergi bekerja, dan lain-lain.
- Ketika musim penghujan dan air pasang, meskipun lanting tidak tenggelam, tinggal di lanting juga dapat membahayakan penghuninya karena air sungai yang deras. Lanting bisa hanyut dan bertabrakan satu sama lain. Anak-anak terpaksa libur sekolah karena kondisi bantaran yang licin dan berbahaya. Lansia diungsikan ke tempat keluarga di darat.

Masyarakat lanting berada dalam dilema besar. Tidak adanya status kepemilikan ruang yang jelas, ditambah dengan labelisasi 'kumuh' pada permukiman lanting menimbulkan rasa was-was dan ketidakpastian, meskipun sejauh ini persoalan squatter belum ditanggapi serius di Indonesia karena sistem hukum pertanahan yang fleksibel telah memberikan hak untuk tinggal di kota, atau dengan kata lain kampung-kampung di tengah kota 'diizinkan' oleh pemerintah, karena pemerintah tidak bersedia menyediakan dana untuk perumahan rakyat (Kusno, 2012).

Namun, terlepas dari citra lanting sebagai pemukiman orang miskin atau kumuh, sebagian besar penghuni lanting merasakan banyak manfaat dan kemudahan, dalam hal biaya hidup maupun kemudahan bermobilitas. Fakta-fakta ini sesuai dengan argumen Turner (1968) yang menyatakan bahwa nilai (value) yang terletak pada hubungan antara manusia dan lingkungan bukan hanya masalah kondisi fisik semata, karena lingkungan tempat tinggal yang secara fisik memenuhi standar material tinggi belum tentu memiliki nilai tinggi jika keluarga yang tinggal di dalamnya tidak mendapatkan jaminan kelangsungan ekonomi jangka panjang, misalnya karena lokasi tempat tinggal yang terlalu jauh, biaya sewa yang terlalu mahal, dan sebagainya. Jadi, sekalipun tempat tinggal itu hanya berupa gubuk pada sebidang kecil tanah, ia akan bernilai tinggi jika bisa membebaskan pemilik dari biaya hidup yang tinggi, memberinya peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, menginvestasikan tabungannya, dan memanfaatkan waktu luangnya (Turner 1968).

##### 5. Situasi eksternal, isu lingkungan dan Upaya Bertahan

Dari aspek lingkungan, penurunan kondisi lingkungan (khususnya sungai) telah menimbulkan kekhawatiran di antara penghuni lanting. Deforestasi besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit telah mencemari dan mengganggu siklus hidrologi sungai Kapuas dan Melawi. Pola pasang surut menjadi tidak menentu, menyebabkan perubahan tinggi muka air sungai secara drastis, yang berbahaya bagi stabilitas struktur lanting. Pasokan kayu untuk bahan lanting semakin langka akibat deforestasi dan illegal logging. Limbah dari perkebunan kelapa sawit dan penambangan liar telah mencemari sungai dan secara drastis mengurangi populasi ikan air tawar (Cleary dan Eaton, 1992; Koninck, Bernard dan Bissonette, 2011). Degradasi lingkungan pada skala yang sangat luas ini telah berdampak langsung pada ruang hidup masyarakat lanting di Sintang, yang mengharuskan masyarakat lanting untuk melakukan berbagai upaya untuk bertahan. Ketika harus menempati ruang-ruang marginal, segmen masyarakat tertentu memiliki

kerentanan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan, baik alami maupun akibat ulah manusia (Zimmerer, 1996 dalam Tanner, 2003).

Taktik sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat lanting untuk mengantisipasi kendala lingkungan pada dasarnya merupakan bagian dari proses interaksi sosial-ekologis yang dinamis dan berkesinambungan (Cabello et al, 2015), yang melibatkan banyak pihak. Di satu sisi, ada aktor yang bertanggung jawab menyebabkan kerusakan lingkungan melalui deforestasi, pembukaan lahan, illegal logging dan pertambangan, dan sebagainya; Ada juga pengambil kebijakan (pemerintah) yang dalam hal ini lalai dalam melaksanakan penegakan hukum untuk menjamin kelestarian lingkungan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Di sisi lain, ada masyarakat yang menjadi korban, terutama masyarakat lanting yang terkena dampak langsung. Upaya sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat lanting tersebut merupakan representasi dari politik keseharian warga kota dalam menata diri untuk bertahan hidup, di bawah tekanan pasar dan ketidakberpihakan penguasa, atau menggunakan istilah Lefebvre, rangkaian tindakan sehari-hari dalam menangani masalah keterasingan di bawah tekanan kapitalisme (Lefebvre, 1947 dalam Beveridge dan Koch, 2018). Tabel 1 memperlihatkan berbagai taktik dan strategi dalam keseharian warga pemukim lanting.

Tabel 1. Strategi dan Taktik dalam Keseharian Warga Pemukim Tepi Sungai (kasus lanting di Sintang)

Strategi (dilakukan oleh pemerintah/korporasi/pihak lainnya)	Taktik (dilakukan oleh pemilik/penghuni lanting)	Keterangan
Kebijakan dan perencanaan kota, yang cenderung memarjinalkan pemukiman lanting dan penghuninya	Mengamankan ruang dan teritori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masing-masing pemilik lanting mengklaim dan menandai lokasi tertentu sebagai teritorinya, serta senantiasa menjaga posisi lanting agar tidak bergeser/berpindah.</li> <li>- Membuat kesepakatan di antara pemilik lanting dalam klaim atas ruang: <i>"siapa cepat dia dapat"</i></li> </ul>
	Membina hubungan baik dengan aparat pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses terhadap dokumen identitas legal (KTP, Kartu Keluarga, ijin usaha)</li> <li>- Akses terhadap informasi awal terkait rencana/program pemerintah yang berpotensi mengancam pemukiman lanting (mis. Pembangunan dermaga, pelabuhan, jembatan, penataan waterfront)</li> </ul>
	Meningkatkan nilai tambah dengan memfungsikan lanting sebagai ruang produksi dan komersial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jetty/dermaga</li> <li>- Area loading barang</li> <li>- Rest Area</li> <li>- Kios/warung (kelontong, BBM, warung makan)</li> <li>- Penginapan</li> <li>- Kost</li> <li>- Pasar Kaget</li> </ul>
Kebijakan pemerintah yang melarang kegiatan penebangan dan distribusi kayu secara liar	Konstruksi dan perawatan lanting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat lanting di daerah hulu sungai, untuk kemudian ditarik dengan kapal ke Sintang dan tujuan lainnya.</li> <li>- Mengecek dan memperbaiki kerusakan bangunan secara rutin untuk mencegah kerusakan serius.</li> </ul>
Perkebunan kelapa sawit skala besar dan PETI (penambangan emas tanpa izin), yang mengakibatkan deforestasi secara masif dan kerusakan lingkungan.	Mengatasi hambatan-hambatan lingkungan (pencemaran air sungai, banjir, kekeringan, pasang-surut yang tak menentu)	<p>Membangun pengetahuan dan kebiasaan sehari-hari untuk mengantisipasi perubahan lingkungan, khususnya lingkungan sungai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menarik dan mengulur tali tambat sesuai ketinggian muka air sungai, maupun terhadap kondisi arus sungai.</li> <li>- Membersihkan sampah yang menyangkut di lanting, yang dapat memberatkan lanting.</li> <li>- Mengatur jarak aman antar lanting, agar tidak saling berbenturan.</li> </ul>

<b>Strategi</b> (dilakukan oleh pemerintah/korporasi/pihak lainnya)	<b>Taktik</b> (dilakukan oleh pemilik/penghuni lanting)	<b>Keterangan</b>
		- Mengamankan barang-barang dan perabot rumah dari goyangan. - Mengatasi kendala air bersih dengan menampung air hujan maupun membeli air bersih. Tindakan preventif: - Mengatur giliran jaga, baik di siang hari maupun malam hari, untuk senantiasa mengecek keamanan lanting - Mengungsikan anggota keluarga lansia/bayi ke darat ketika cuaca buruk.

Sumber: hasil analisis

## 5. KESIMPULAN

Dengan mengambil studi kasus permukiman tepi sungai di Kota Sintang yaitu lanting, dapat disimpulkan bahwa fenomena permukiman tepi sungai di kota-kota Kalimantan tidaklah selalu merupakan masalah yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan perkotaan, namun memiliki latar belakang historis, sosial dan budaya yang kompleks. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat lanting untuk co-exist dalam dinamika kehidupan Kota Sintang yang relatif sudah maju dan modern mendorong tetap maraknya permukiman lanting hingga saat ini.

Kehidupan lanting dewasa ini merupakan bentuk perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan di berbagai tingkatan yang cenderung memarginalkan masyarakat lanting. Perlawanan ini mencakup berbagai tindakan dan perilaku di semua tingkat kehidupan sosial manusia (individu, kolektif, dan institusional) dan dalam sejumlah pengaturan yang berbeda, termasuk sistem politik (Hollander dan Einwohner, 2004). Seperti dikatakan oleh Harvey (2013), urbanisme terjadi di arena politik. Intervensi dan desain spasial tidak terjadi dalam ruang hampa. Mereka terjadi dalam struktur pemerintahan yang nyata di mana ada perebutan kekuasaan, ketidaksepakatan, dan negosiasi yang berkelanjutan. Politik sendiri dapat didefinisikan sebagai setiap peristiwa, kegiatan, atau organisasi yang mencoba mengatur kehidupan masyarakat, yang pada banyak kasus menggunakan mekanisme yang mengikat (Dooley 2014). Oleh karena itu, politik sangat erat kaitannya dengan gagasan "kehidupan masyarakat", "hidup bersama" dengan cara tertentu, yang bisa dicapai dengan kerja sama, namun juga bisa melalui konflik, seperti yang dapat dilihat dalam keseharian masyarakat lanting. Menurut Crozier dan Friedberg (1980) kerjasama dan konflik adalah dua gagasan kunci untuk memahami bahwa setiap tindakan, atau keinginan bertindak, atau dorongan untuk bertindak secara kolektif dari suatu komunitas manusia, dengan cara-cara tertentu, adalah "politis".

Dalam dimensi kontemporer dan keseharian, masyarakat lanting di Sintang sering terjerumus dalam situasi informalitas, karena dalam cara pandang yang dominan, tatanan masyarakat perkotaan di Indonesia sering dianggap bercirikan kondisi ekstrim dualitas tunggal—seperti dua sisi mata uang—seperti modern-tradisional, formal-informal, dan kapitalis-bazar (Harjoko, 2016). Analisis Barat ini mengklasifikasikan dualitas masyarakat ini sebagai dikotomi, dimana struktur dualitas melebur menjadi masyarakat kapitalis yang relatif tunggal. Harjoko mengkritik pandangan tersebut dan mengatakan bahwa fenomena ini bukanlah dikotomi, melainkan membentuk dua struktur masyarakat yang berkaitan dengan nilai dan norma, yang hidup berdampingan dalam ruang (Ibid., 2016). Dengan demikian, lanting perlu dilihat sebagai elemen perkotaan yang hadir bersama (co-exist) dengan elemen-elemen perkotaan lainnya dalam kedudukan yang sejajar.

Kehadiran permukiman tepi sungai di Sintang merupakan manifestasi dari masyarakat pemukim sebagai subjek aktif dan kreatif yang dengan segala kemampuan dan keterbatasannya senantiasa berusaha merespons berbagai situasi, baik dinamika kehidupan perkotaan, kebijakan pemerintah, maupun



perubahan lingkungan, dengan memproduksi berbagai tindakan taktis untuk mempertahankan eksistensinya, dengan dibekali pengetahuan dan kearifan dalam berinteraksi dengan ekologi sungai, sebagai ruang tempat hidup mereka. Lanting sebagai representasi dari *being* atau *Dasein* (Heidegger), adalah upaya masyarakat pemukim tepi sungai untuk menunjukkan eksistensinya di lingkungan perkotaan tidak peduli betapa tidak asingnya lingkungan baginya. Mengutip kata-kata Heidegger (dalam Rose, 2012): “to say that mortals are is to say that in dwelling they persist through spaces by virtue of their stay among things and locations.” Seperti halnya praktik bertinggal di konteks perkotaan, lanting juga dapat dilihat sebagai praktek menandai dan mengklaim ruang, di mana lanting sebagai *Dasein* ada di setting perkotaan, tetapi keberadaan ini tidak dilihat dan dianggap hanya sebagai lanting itu sendiri. Dalam konteks ini, lanting dibuat untuk menandai dan mengklaim ruang urban di mana lingkungan perkotaan dinyatakan sebagai bukan hanya lingkungan yang asing, tetapi sebagai lingkungan 'kami' bagi mereka. Melalui lanting mereka berjuang untuk mempertahankan dunia yang berubah tanpa henti ini dengan mengklaimnya sebagai representasi kehadiran mereka di ruang perkotaan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Bertuzzo, E., Maritan, A., Gatto, M., Rodriguez-Iturbe, I., & Rinaldo, A. (2007). River networks and ecological corridors: Reactive transport on fractals, migration fronts, hydrochory. *Water Resources Research*, 43, W04419. <https://doi.org/10.1029/2006WR005533>
- Beveridge, R., & Koch, P. (2018). Urban everyday politics: politicising practices and the transformation of the here and now. *Environment and Planning D: Society and Space*, (doi:10.1177/0263775818805487).
- Blaikie, P.M. & Brookfield, H. (1987). *Land Degradation and Society*. London: Methuen.
- Cabello, V., Willaarts, B., Aguilar, M., & Del Moral Ituarte, L. (2015). River basins as social-ecological systems: linking levels of societal and ecosystem water metabolism in a semiarid watershed. *Ecology and Society* 20(3): 20. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-07778-200320>.
- Certeau, Michel de (1984). *The Practice of Everyday Life*. Berkeley: University of California Press.
- Chase, J., Crawford, M. & Kaliski, J. (1999). *Everyday Urbanism*. NY, Monacal Press.
- Cleary, M., & Eaton, P. (1992). *Borneo Change and Development*. Singapore, Oxford University Press.
- Crozier M., dan Friedberg E. (1980) *Actors and Systems*, Chicago, University of Chicago Press.
- Dhananka, S. R. (2016). The Production of Space and Governmentality in the Urban Poor's Claim over Land and Housing. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal* Vol 14.
- Dooley K. L. (2014), *Why Politics Matters: An Introduction to Political Science*, Boston, Cengage Learning.
- Evers, Hans-Dieter. (2015). Kampung Air: Water Settlements on the island of Borneo. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* Vol.88, Part 1, No. 308, June 2015, pp. 79-85.
- Grimm, N. B., Faeth, S. H., Golubiewski, N. E., Redman, C. L., Wu, J., Bai, X., & Briggs, J. M. (2008). Global change and the ecology of cities. *Science*, 319(5864), 756–760.
- Fox, S. (2013) *The Political Economy of Slums: Theory and Evidence from Sub-Saharan Africa*. Working paper. London: Development Studies Institute, LSEPS.
- Harjoko, T. Y. (2016). I Dwell in [Im] possibility: Legitimizing the Informal Economy around the Bus Terminal in Kampung Melayu, Jakarta. *Traditional Dwellings and Settlements Review*, 28(1), 77-77.

- Harvey, D. (2013). *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. Verso.
- Hellman, J. (2018). How to Prove You are Not a Squatter: Appropriating Space and Marking Presence in Jakarta. In Cabannes Y., Douglass M., & Padawangi R. (Eds.), *Cities in Asia by and for the People* (pp. 41-68). Amsterdam: Amsterdam University Press. doi:10.2307/j.ctv7xbs0b.5
- Hollander, J., & Einwohner, R. (2004). Conceptualizing Resistance. *Sociological Forum*, 19(4), 533-554. Retrieved June 5, 2021, from <http://remote-lib.ui.ac.id:2063/stable/4148828>
- Khee Giap Tan; Merdikawati, N., Amri, M., Berger, B. H. (2015). *2014 Annual Competitiveness Analysis and Development Strategies for Indonesian Provinces*. World Scientific. pp. 286-. ISBN 978-981-4730-43-3.
- King, R., & Idawati, D. (2010). Surabaya Kampung and Distorted Communication. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 25(2), 213-233. Retrieved August 23, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/41057097>
- Koninck, R. D., Bernard, S., & Bissonnette, J. (2011). *Kalimantan transformed: agricultural expansion on the Southeast Asian frontier*. Singapore: NUS Press.
- Kusno, A. (2012) *Politik Ekonomi Perumahan Rakyat dan Utopia Jakarta*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lefebvre, H. (1947). *Critique of everyday life*. London & New York: Verso.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*, Translated by Donald Nicholson-Smith, Oxford: Blackwell.
- Little, P. E. (2007). *Political ecology as ethnography: a theoretical and methodological guide*. *Horiz.antropol. vol.3 no.se Porto Alegre*.
- Lynch, K. (2005). *Rural-Urban Interaction in The Developing World*. Canada: Routledge.
- Perramond, E. P. (2007). *Tactics and Strategies in Political Ecology Research*. *Area* 39 (4). Wiley: 499–507. <http://www.jstor.org/stable/40346071>.
- Prompayuk, S. & Chairattananon, P. (2016). Preservation of Cultural Heritage Community: Cases of Thailand and developed countries. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 234 ( 2016 ) 239 – 243.
- Robbins, S. P. (1998). *Organization Behavior, Concepts, Controversies, Application*, seventh edition, Englewood Cliffs.
- Rocco, R. (2014). Why should we discuss spatial justice in Urbanism studies? *Polis*.
- Rose, M. (2012). Dwelling as marking and claiming. *Environment and Planning D: Society and Space* 2012, volume 30, pages 757 – 771.
- Ryoji, S. (2007) *People on the Move: Rural-urban Interactions in Sarawak*. Kyoto: Kyoto University Press.
- Swyngedouw, E. (2004). *Social Power and the Urbanization of Water: Flows of Power*. Oxford University Press.
- Tedlock, B. (2000). "Ethnography and Ethnographic Representation." In *Handbook of Qualitative Research*, 2nd edition, ed. N.K. Denzin and Y.S. Lincoln. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Turner, J. C. 1968. Housing Priorities, Settlement Patterns, and Urban Development in Modernizing Countries. *AIP Journal* November 1968 p.354 – 363.

Wittfogel, Karl (1957). *Oriental despotism; a comparative study of total power*. New York: Random House. ISBN 978-0-394-74701-9.

Zimmerer, K. S. (1996). *Changing Fortunes: Biodiversity and peasant livelihood in the Peruvian Andes*. Dalam: Tanner, T. (2003). *People, parks and processes: A political ecology of conservation and development in Northwest Argentina*. ProQuest LLC.